



PAPARAN KEILMUAN JABATAN GURU BESAR
UNIVERSITAS PADJADJARAN

PENGUATAN PARADIGMA PENATAAN RUANG DAN PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN LINGKUNGAN LINTAS GENERASI



Prof. Dr. Maret Priyanta, S.H., M.H.

**PENGUATAN PARADIGMA PENATAAN RUANG DAN
PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN UNTUK
MEWUJUDKAN KEADILAN LINGKUNGAN
LINTAS GENERASI**

Paparan Keilmuan Berkenaan dengan Pengukuhan Jabatan
Guru Besar dalam Bidang Hukum Tata Ruang pada
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Bandung, 19 Agustus 2025

Oleh

Maret Priyanta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2025**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua.

Kepada yang terhormat,

1. Rektor Universitas Padjadjaran;
2. Pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat;
3. Pimpinan dan anggota Senat Akademik Universitas Padjadjaran;
4. Pimpinan dan anggota Dewan Profesor;
5. Para Guru Besar, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, dan Direktur di lingkungan Universitas Padjadjaran,
6. Para dosen, tenaga kependidikan dan Para tamu undangan yang saya hormati,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT dan merupakan suatu kehormatan, Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan paparan keilmuan dalam rangka pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Tata Ruang dengan judul:

PENGUATAN PARADIGMA PENATAAN RUANG DAN PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN LINGKUNGAN LINTAS GENERASI

Hadirin yang saya hormati,

Pembangunan merupakan salah satu upaya sekaligus tanggung jawab yang dilakukan negara-negara di dunia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, kegiatan pembangunan dilakukan melalui pemanfaatan dan optimasi berbagai potensi sumberdaya yang dikuasai dan dimiliki oleh negara.

Hukum Tata Ruang merupakan bidang ilmu hukum yang mempelajari arah kebijakan pembangunan nasional serta menjawab pertanyaan apa yang menjadi peran hukum dalam perencanaan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi dan misi negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan cita-cita dan amanat konstitusi 1945.

Hukum Tata Ruang dikembangkan berdasarkan Mahzab UNPAD buah pemikiran Professor Mochtar Kusumaatmadja melalui Teori Hukum Pembangunan yang pada prinsipnya mengarahkan peran instrument hukum dalam sebagai sebuah kebijaksanaan (*wisdom*) negara dalam memberikan ketertiban, kepastian hukum, mendorong kemanfaatan dan keadilan dalam penataan ruang. Hukum tata ruang menjadi bidang ilmu hukum yang mengawal implementasi pembangunan menjadi lebih terarah, terencana, tertib dan teratur.

Hadirin yang saya hormati,

Negara Indonesia saat ini dan kedepan akan mengalami berbagai tantangan dalam mewujudkan penataan ruang nasional yang berkeadilan. Visi dalam menata ulang (*redevelopment*) kawasan perkotaan, melindungi kawasan perdesaan, melindungi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dihadapkan pada dinamika sosial dan konflik penguasaan atas tanah dan ruang. Penataan ulang (*redevelopment*) kawasan perkotaan dihadapkan pada sulitnya penyediaan tanah dan lahan untuk kepentingan umum dan membangun fasilitas infrastruktur publik yang layak termasuk penyediaan ruang terbuka hijau sebagai pengendali iklim lokal.

Kawasan perdesaan dihadapkan pada tantangan seputar ketidakjelasan status lahan, kesulitan penetapan lokasi untuk lahan pangan berkelanjutan untuk ketahanan pangan, alih fungsi dan peruntukan lahan pertanian, Kawasan hutan serta perlindungan masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan lahan akibat konflik antara kegiatan pertambangan, kehutanan dan perkebunan dalam kawasan hutan. Tantangan dan dinamika konflik pada ruang darat direspon dengan menggeser konflik pemanfaatan ke wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui kegiatan reklamasi, pertambangan pada pulau-pulau kecil yang berdampak pada menurunnya daya tampung dan daya dukung ekosistem pesisir dan mengganggu ruang kehidupan masyarakat pesisir.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang ideal, dibutuhkan sinergitas sejak awal melalui perencanaan pembangunan yang berbasis kepada rencana tata ruang dengan mengedepankan instrumen hukum yang bersifat memaksa dan mengikat untuk ditaati dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat termasuk pemerintah.

Hukum berperan dalam mendorong penataan ruang wilayah negara Indonesia yang berkeadilan serta tercermin dalam materi muatan rencana tata ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan secara hierarki dan komplementer. Perencanaan ruang yang ditetapkan didasarkan klasifikasi sistem, dengan menyediakan sebanyak mungkin kawasan dengan fungsi lindung yang dipadukan dengan penetapan kawasan dengan fungsi budidaya yang disesuaikan dengan karakter wilayah administratif untuk kegiatan yang memiliki nilai strategis yang ditetapkan dari sudut pandang kepentingan ekonomi, sosial budaya, kedaulatan negara, lingkungan, pertahanan/keamanan, dan kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Konstitusi Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), dimana negara menguasai seluruh sumber daya sebagai kekayaan negara yang dikuasai (hak menguasai negara) dan memanfaatkannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan atas sumber daya tersebut harus tetap menganut secara terpadu *environmental constitution* dalam Konstitusi Indonesia sebagai hak eksplisit untuk hidup dalam lingkungan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Tabel :
Indikator Kesejahteraan dalam Perwujudan Tujuan Penataan Ruang

Tujuan	Definisi	Kata Kunci	Kriteria	Indikator
Aman	Situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman	ancaman berupa bencana alam atau non alam	Upaya mitigasi terhadap ancaman bencana	a. Pembatasan kegiatan di kawasan rawan bencana b. Prinsip Kehati-hatian dalam perencanaan pada kawasan rawan bencana
Nyaman	Keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya secara inklusif dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai	a. mengartiku lasikan nilai sosial budaya secara inklusif b. Suasana Tenang dan Damai	Penyediaan Ruang untuk artikulasi dan inklusif	a. Tersedianya ruang hijau b. Tersedianya ruang publik c. Ruang yang inklusif
Produktif	Memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing	a. nilai tambah ekonomi b. efektivitas	Akselerasi Pertumbuhan kegiatan ekonomi	a. Tingkat aksesibilitas dan mobilitas yang terukur b. Inter koneksi mobilitas dengan pusat-pusat ekonomi secara terukur
Berkelanjutan	Kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan	kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan	Degradasi Lingkungan	a. lingkungan fisik sekitar tidak terganggu b. Bebas dari pencemaran

Hadirin yang saya hormati,

Penguatan paradigma Rencana Tata Ruang menjadi satu-satunya produk hukum yang dijadikan dasar bagi seluruh kegiatan pemanfaatan ruang perlu terus didorong menjadi politik hukum nasional. Sesuai dengan tujuannya, materi muatan dalam Rencana Tata Ruang merupakan hasil sebuah proses teknokratik, birokratik, partisipatif, dan politik dimana penetapan fungsi lindung atau budidaya pada kawasan dan/atau zona pada alokasi ruang telah mencerminkan sinkronisasi kebijakan antarsektor, antarkewenangan, antardaerah dan antarkepentingan. Sehingga pilihan untuk melarang atau memperbolehkan secara terbatas dan/atau bersyarat kegiatan pada suatu kawasan dan/atau zona tidak semata-mata hanya didasarkan pada keberadaan potensi SDA yang ada, namun juga telah didasarkan pada kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), visi dan politik hukum daerah serta pelibatan dan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal.

Hukum berfungsi guna mewujudkan dalam kenyataan. Bekerjanya Hukum sebagai pandu dalam membina, mengawasi dan menjamin proses pembangunan di segala bidang agar sampai di tujuan nasional melalui Rencana Tata Ruang yang antisipatoris, preventif, korektif, berkelanjutan, tertib dan teratur, serta Kepastian Hukum, dengan sarana utamanya peraturan perundang-undangan.

Hukum dalam Pembangunan, juga penting untuk memelihara ketertiban, keteraturan dan kepastian hukum yang melampaui dimensi waktu tertentu, namun sekaligus memberi ruang gerak bagi terjadinya perubahan. Maka sesungguhnya Hukum harus berdiri di depan sebagai panglima, menunjukkan arah bagi terselenggaranya proses pembangunan nasional secara terencana, bertahap dan berkelanjutan.

Hukum Tata Ruang ke depan akan berperan dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang darat, laut, udara dan dalam bumi. Riset bidang tata ruang ke depan akan diarahkan pada pembaruan konsep hukum dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang

penataan ruang dalam untuk memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat dalam mencegah dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang melalui pembaruan dan penyempurnaan Sistem Hukum Penataan Ruang Indonesia.

Hadirin yang saya hormati,

Dengan penuh rasa syukur, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan memberikan kontribusi besar dalam perjalanan akademik saya hingga hari ini. Izinkan saya memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, dan karunia-Nya yang telah memungkinkan saya untuk mencapai momen penting ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Arief Sjamsulaksan Kartasmita, dr., SpM(K), M.Kes., PhD., dan Para Wakil Rektor;
2. Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA;
3. Rektor Universitas Padjadjaran periode 2019-2024 Prof. Dr. Rina Indiasuti, S.E., M.SIE.,
4. Ketua Dewan Profesor, Prof. Arief Anshori Yusuf., M.Sc., PhD
5. Sekretaris Dewan Profesor, Prof. Dr. Arlette Suzy, drg., Sp.KGA, Subsp. AIBK., M.Psi., FSCDA, FIADH;
6. Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum;
7. Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Riset Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Raden Achmad Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D
8. Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H.
9. Para Guru Besar, Dosen, Asisten, Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa Fakultas Hukum UNPAD khususnya Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria.
10. Para Guru Besar dan Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H., (Alm) Prof. Dr. M Daud Silalahi, S.H, Prof. Dr. Takdir

Rahmadi, S.H., LL.M, Dr. Amiruddin Ahmad Dajaan Imami, S.H., M.H , (Alm) Dr. Rudi Muhammad Rizki, S.H, LL.M.dan Dr. Rika Ratna Permata, S.H, M.H.

11. Kerabat Pusat Studi Hukum Lingkungan dan Penataan Ruang Prof. Dr. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., CN, Dr. Agus Mulya Karsona, S.H., M.H., Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H, Dr. Imamulhadi, S.H., M.H, Dr. Supraba Sekarwati Widjayani, S.H., CN, Dr. Susilowati Suparto, S.H., M.H, Dr. Nadia Astriani, S.H., M.Si dan Yulinda Adharani, S.H., M.H.

Selanjutnya terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada kedua Ayahanda Tercinta (Alm) Drs, Asmawie Asmad, BE., M.Sc. dan (Alm) Drs, Thamrin Mansyur serta Kedua Ibunda tercinta Roswita Saidan, BA dan Warnida Aziz serta Seluruh Keluarga Besar Asmad Udok, Keluarga Besar Saidan Sutan Sinaro, Keluarga Besar Thamrin Mansyur dan Keluarga Besar Bagindo Aziz.

Terakhir, namun yang paling penting, saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada istri tercinta Vivi Aprilina serta kedua anakku tersayang Hanunnisa Almira Priyanta dan Hanan Danishalano Priyanta, atas doa, dukungan, pengertian dan perhatian yang diberikan, semoga pencapaian ini menjadi penyemangat bagi kehidupan kalian kelak di masa yang akan datang. Aaamin YRA

Hadirin yang saya hormati,

Sebelum menutup paparan keilmuan ini, izinkan saya menyampaikan harapan semoga hukum tata ruang kedepan dapat berperan dalam mewujudkan visi negara, menjaga mimpi bangsa serta menjaga harapan untuk mencapai keadilan lingkungan lintas generasi dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Terima Kasih, Wabillahitaufik Wal Hidayah
Wassalamualaikum wa rohmatullahi wa barokatuh

REFERENSI

- Amiruddin A. Dajaan Imami, *Hukum Penataan Ruang Kawasan Pesisir: Harmonisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan*, Logoz Publishing, 2014.
- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution, Nuasa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Press, 2010.
- Louka, Elli, *Environmental Law: Fairness, Effectiveness, and World Order*, Cambridge University Press, New York, 2006.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta.
- , *Pembinaan hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, 1972.
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku II : Nasional*, Binacipta 1985.
- Priyanta, M., 2010. Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (green Constitution) di Indonesia sebagai tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Konstitusi*, 7(4), pp.113-130.
- , 2015. Pembaruan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan dan penataan ruang menuju pembangunan berkelanjutan. *Hasanuddin Law Review*, 1(3), pp.337-349.
- and Adharani, Y. *Sinkronisasi Kebijakan Perencanaan Ruang di Wilayah Perairan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Logoz Publishing, Bandung, 2019
- and Zulkarnain, C.S.A., 2023. Sustainable Infrastructure Legal Policy in Indonesia: A National Strategic Project Approach for National Development. *Sriwijaya Law Review*, pp.1-18.
- , 2024. Urban green open space in developing countries: Indonesia regulations, problems and alternative solutions. *Journal of Property, Planning and Environmental Law*, 16(2), pp.134–151. <https://doi.org/10.1108/JPEL-01-2024-0002>
- Silalahi, M. Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, 2001.
- Soemarwoto, Otto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1985.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, PT Alumni, Bandung, 1991.

RIWAYAT HIDUP (*CURRICULUM VITAE*)



- | | |
|----------------------------|--|
| 1 Nama Lengkap | : Prof. Dr. Maret Priyanta, S.H., M.H. |
| 2 Jabatan Fungsional | : Guru Besar |
| Jabatan Struktural | : Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Organisasi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran |
| Pangkat/ Golongan | : Pembina Tingkat I/ IV/b |
| 3 Tempat dan Tanggal Lahir | : Bandung, 22 Maret 1981 |
| 4 e-mail | : maret.priyanta@unpad.ac.id |

PENDIDIKAN TINGGI

Uraian	S1	S2	S3
Perguruan Tinggi	Universitas Padjadjaran	Universitas Padjadjaran	Universitas Padjadjaran
Program Studi	Sarjana Ilmu Hukum	Magister Ilmu Hukum	Doktor Ilmu Hukum
Tahun	2000-2004	2008-2011	2013-2017

KARYA PUBLIKASI

Tahun	Judul	Penerbit/ Jurnal
2009	Buku Referensi : Asas Subsidiaritas, Kedudukan dan Implementasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan	Pusat Pengkajian Penyelesaian Sengketa Lingkungan – Bestari Bandung, 2009 ISBN 978-979-18-7-5

Tahun	Judul	Penerbit/ Jurnal
2012	Buku Referensi : Perizinan Terpadu Untuk Perbaikan Tata Kelola Hutan di Indonesia: Studi Kasus Kalimantan Tengah	Indonesian Center For Environmental Law (ICEL) dan Kemitraan, 2012 ISBN: 978-602-95603-2-9
2013	Buku Prosiding : Seminar Nasional Hukum Lingkungan Kini dan Masa Depan	Bagian Hukum dan Pembangunan/ Masyarakat Fakultas Hukum UNPAD ISBN 978-602-9272-15-4
2016	Monograf: Pengantar Hukum Sumber Daya Alam : Tim Penulis	Penerbit Tataletak Pustaka Prima ISBN 978-602-97253-8-4
2016	Buku Ajar: Hukum Lingkungan	Kalam Media ISBN: 978-602-17692-6-3
2017	Perkembangan Hukum Bisnis dalam Era Globalisasi (Editor)	ISBN 978-602-99552-9-3 Corbooks 2017
2018	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam Kerangka Pembaruan Sistem Hukum Lingkungan dan Tata Ruang Berbasis Perubahan Iklim	ISBN 978-602-9272-76-5 Logoz Publishing (2018)
2019	Sinkronisasi kebijakan perencanaan ruang di Wilayah perairan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di indonesia Perspektif Hukum Dualisme Pengaturan Rencana Tata Ruang Darat Dan Laut	ISBN Logoz Publishing (2018)
2021	Buku Ajar Hukum Tata Ruang	ISBN Logoz Publishing (2021)

Tahun	Judul	Penerbit/ Jurnal
2022	Tim Penyusun Buku Bunga Rampai Pemberian Hak atas Tanah di Peraliran Laut: Penyimpangan Yuridis terhadap United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan Putusan Mahkamah Konstitusi	Penerbit Buku Kompas
2023	Citizen Lawsuit di Indonesia: Tinjauan terhadap Substansi, Prosedur, serta Eksekusi “Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Ruang Udara yang Aman, Nyaman, dan Berkelanjutan”	Indonesia Center for Environmental Law (ICEL)
2024	Eksplorasi Wilayah Pesisir di Indonesia: Perspektif Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria untuk Pembangunan Kepariwisata Berkelanjutan	ISBN Logoz Publishing (2024)

PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH

Tahun	Judul Artikel	Penerbit	Status Jurnal
2019	Law Enforcement Towards Environmental Damage and Pollution Caused by Open-Pit Coal	Tarumanegara Law Review, Volume 1., Issue 1, 2019	Jurnal Nasional ISSN
2019	Legal Issue on Infrastructure Development to Realize Integrated Connectivity and Integrated in The Urban Areas	International Sustainable Development Research Society Conference,	International <i>Proceeding</i> Ber- ISBN: 978-88-943228-6-6.
2020	Optimization Of The Multidoor Approach Implementation In Handling Criminal Cases In The Environmental Field	Volume 5 Issue 1, June 2020: pp. 99-115. Copyright ©2020.	TALREV. Tadulako University, Palu, ISSN: 2527-2977 e- ISSN: 2527-2985 SINTA 3

Tahun	Judul Artikel	Penerbit	Status Jurnal
2020	The Implication Of Land Acqui-sition For The Developmentof National Strategic Project Towards Sustainable Agri-cultural/Farming Land: The Case Study Of The Development Project Of Jakarta-Bandung Rapid Train	volume 9, No. 4 of <i>International Journal of Supply Chain Management (IJSCM)</i> [ISSN 2050-7399 (Online), 2051-3771 (Print)]	Indexed in Scopus Q3 (Elsevier), DOAJ, EBSCO, Google Scholar, Scirus, GetCited, Scribd, Citeseerx, Newjour
2021	Synchronizing the spatial planning policy of coastal area in Indonesia toward sustainable development	Vol 14, issue (2021) of the scientific/ Academic	Journal Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation – International Journal of the Bioflux Society Indexed in Scopus Q3
2021	Implikasi Konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan	Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 5 No. 1 Maret 2021	Terakreditasi SINTA 2
2021	Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Kawasan Perdesaan: Implikasi Perubahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja	Jurnal Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 3 Juni 2021	Terakreditasi SINTA 2
2023	Sustainable Infrastructure Legal Policy in Indonesia: A National Strategic Project Approach for National Development	Sriwijaya Law Review Vol. 7 Issue 1, January 2023: 1-18	Indexed in Scopus Q3

Tahun	Judul Artikel	Penerbit	Status Jurnal
2023	Kesiapan Regulasi Indonesia Dalam Mengelola Energi Nuklir Serta Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup	Vol. 3 No. 1 (2023): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 3,	ISSN
2023	Renewable Energy Development in Indonesia From New Normal to Better Normal Environmental Law Perspectives	Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (<i>Journal Of Law</i>) - Vol 10, No 3(2023)	Indexed in Scopus Q3
2024	Legal Aspects of Granting Land Rights for the Bajo Tribe in the Coastal Areas of Indonesia	Journal Coastal Management	Jurnal Internasional Scopus Q2 SJR . 0,703
2024	Urban green open space in developing countries: Indonesia regulations, problems and alternative solutions	Journal of Property, Planning and Environmental Law	Jurnal Internasional Scopus Q1 SJR . 0,496
2024	Perubahan Paradigma Dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Yang Berkelanjutan Dan Menjamin Kepastian Hukum Pasca Politik Hukum Cipta Kerja di Indonesia	Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia	Terakreditasi SINTA 2

JABATAN DALAM ASOSIASI KEAHLIAN

Peran/ Jabatan	Institusi	Tahun
Sekretaris Jenderal (Sekjen)	Asosiasi/ Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)	2013- 2021
Wakil Ketua Bidang Pengebangan Kurikulum	Asosiasi/ Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)	2021- sekarang
Anggota	Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI)	2012 - Sekarang
Anggota	Member of <i>International Sustainable Development Research Society (ISDRS)</i>	Sejak 2017
Pemimpin Redaksi	Jurnal Bina Hukum Lingkungan	2016-2017
Pemimpin Redaksi	Jurnal Poros Hukum Padjadjaran	2020

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI

Peran/ Jabatan	Institusi	Tahun
Staf Akademik	Pembantu Dekan Bidang Akademik	2006-2009
Koordinator Akademik	Program Kelas Kerjasama Fakultas Hukum Unpad -	2010-2011
Anggota	Tim Pembina Lembaga Pengabdian Kepada	2008
Anggota	Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Fakultas Hukum Unpad	2009-2012
Staf Khusus Dekan Bidang SDM Tenaga Pendidik	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	2012-2013
Anggota	Tim Jurnal Legal Review Fakultas Hukum	2012
Anggota	Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI)	2012 - Sekarang

Peran/ Jabatan	Institusi	Tahun
Sekretaris Bagian	Bagian Hukum dan Pembangunan/ Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	2010-2013
Anggota	Pengelola Jurnal Binamulia Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	2013
Ketua Bagian	Bagian Hukum dan Pembangunan/ Masyarakat (HPM) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	2013-2014
Anggota	Unit Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	2016
Kepala	Unit Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	2017
Sekretaris Pusat Unggulan	Pusat Unggulan Maluku <i>Corner</i> Universitas Padjadjaran	2018-2020
Ketua	Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	2020
Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Organisasi	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	2021-2025

